

Vol. 1 – Edisi 6

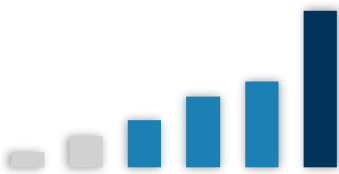
PDRD LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian

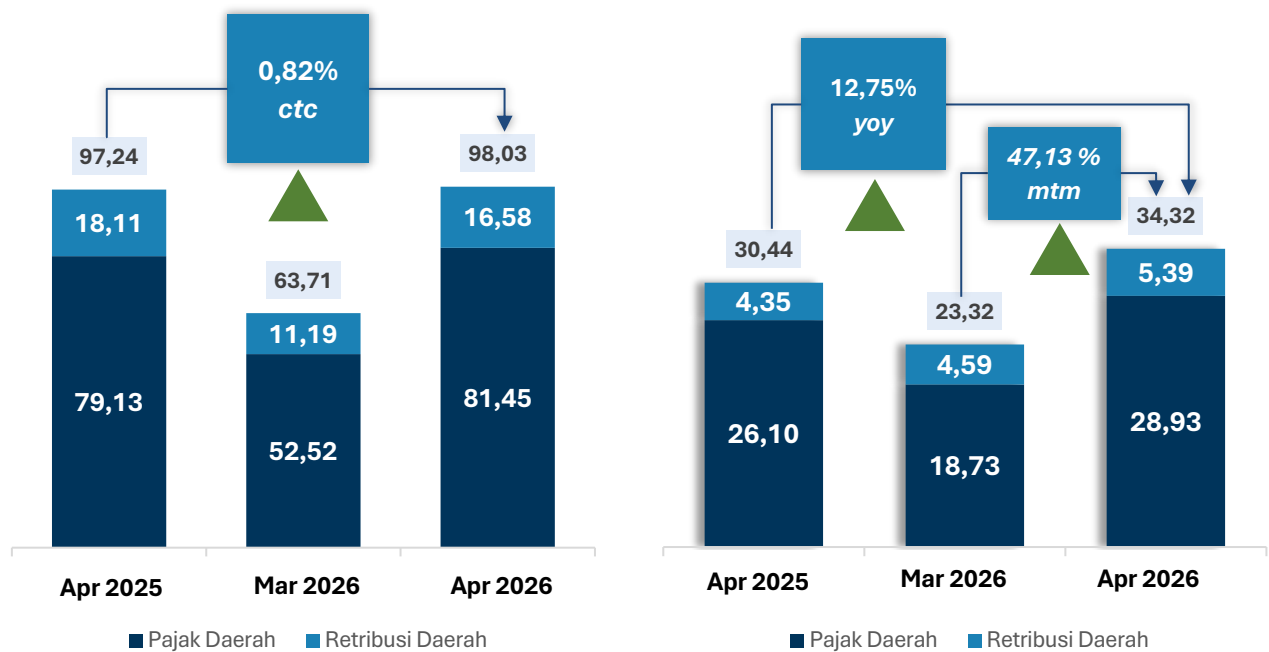


JUNI
2026

PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Realisasi PDRD April 2025-2026 (triliun rupiah)

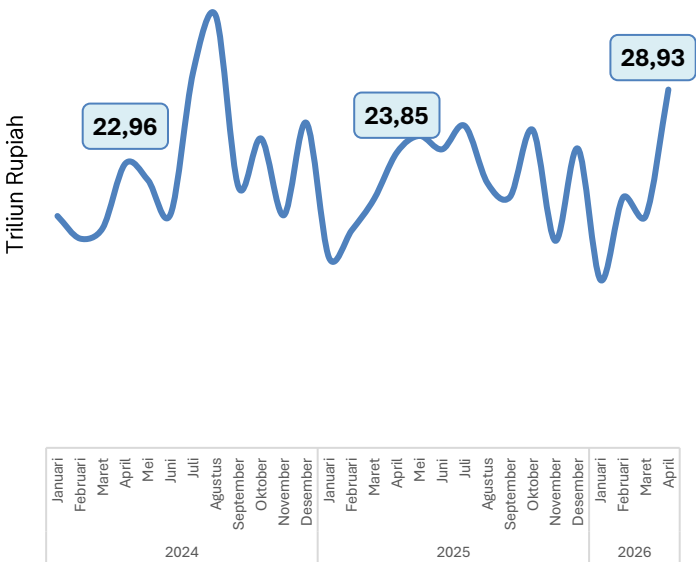


Sumber: SIKD, data per 22 Juni 2026

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada bulan April 2026 mencatatkan kinerja positif, tumbuh secara signifikan, baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy) maupun bulan sebelumnya (mtm). Realisasi penerimaan pajak daerah pada bulan April 2026 tumbuh 10,84% menjadi Rp28,93 triliun (yoy), dan melonjak hingga 54,51% dari bulan sebelumnya. Demikian juga dengan penerimaan Retribusi Daerah pada bulan April meningkat sebesar 24,08% secara yoy dan mengalami kenaikan 17,37% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp5,39 triliun, meskipun secara akumulatif penerimaan retribusi masih mengalami kontraksi sebesar 8,43%. Secara keseluruhan, total penerimaan bulanan melonjak 12,75% (yoy) dan 47,13% (mtm) menjadi Rp34,32 triliun. Lonjakan kinerja bulanan ini turut mendongkrak penerimaan PDRD secara akumulatif hingga April 2026, tumbuh sebesar 0,82% menjadi Rp98,03 triliun, yang ditopang penerimaan pajak daerah.



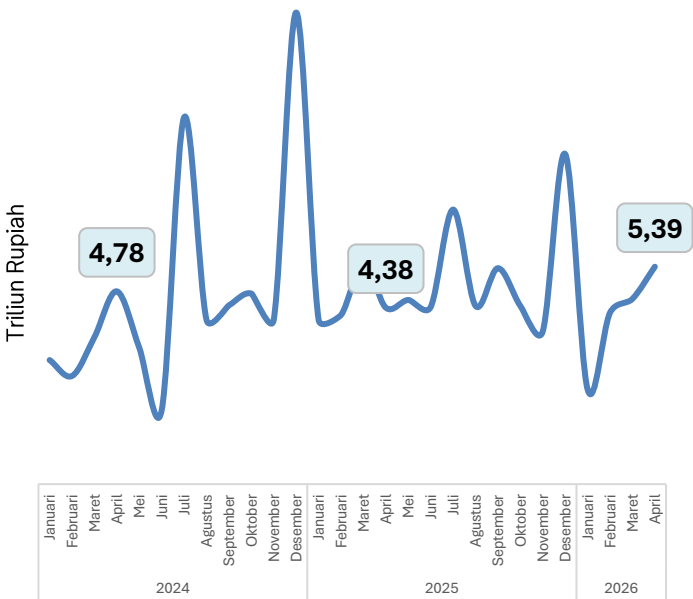
Pola Realisasi Pajak Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 22 Juni 2026

Penerimaan pajak daerah pada bulan April 2026 menunjukkan kinerja tertinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 dan tahun 2024, bahkan menjadi penerimaan tertinggi selama 20 bulan terakhir. Periode ini meneruskan pola historis tahun-tahun sebelumnya yang mencatatkan tren peningkatan. Peningkatan pajak daerah pada April 2026 merupakan rebound dari kondisi bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi, sehingga melanjutkan pola fluktuatif yang terjadi sejak penghujung Triwulan III Tahun 2025.

Pola Realisasi Retribusi Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 22 Juni 2026

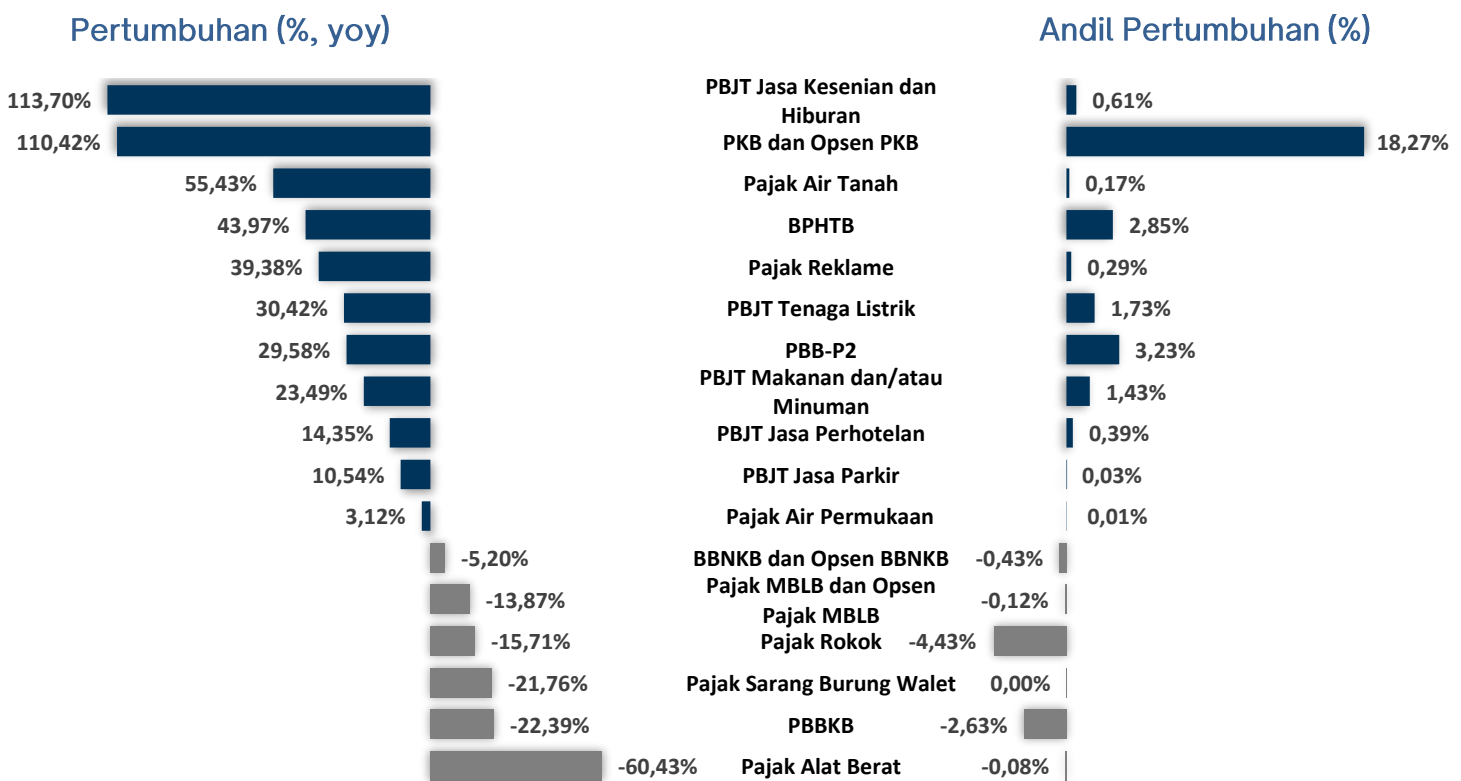
Kinerja penerimaan retribusi daerah pada April 2026 menunjukkan kinerja yang tertinggi dibandingkan dengan periode yang sama dalam 3 tahun terakhir. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan penerimaan yang persisten dari awal tahun. Kinerja ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan jika dibandingkan dengan bulan Maret yang sempat mengalami perlambatan. Pola ini berbanding terbalik dengan tahun 2025 yang justru mengalami kontraksi pada bulan April, tetapi selaras dengan pola tahun 2024 yang juga mengalami peningkatan.



Sebagian besar jenis pajak daerah mencatatkan kinerja pertumbuhan yang sangat positif pada bulan April 2026 (yoy), melanjutkan kinerja positif pada bulan sebelumnya. Tumbuhnya penerimaan pajak daerah secara akumulatif ditopang oleh pertumbuhan positif pada sebelas jenis pajak daerah, sementara enam jenis pajak lainnya mengalami kontraksi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Seluruh jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencatatkan pertumbuhan positif, tertinggi dicapai oleh PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang melonjak sebesar 113,70%. Pertumbuhan diatas 100% juga dicatatkan oleh PKB dan Opsen PKB setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Kinerja positif ini turut diikuti oleh beberapa jenis pajak, di antaranya Pajak Air Tanah (55,43%), BPHTB (43,97%), Pajak Reklame (39,38%), PBJT atas Tenaga Listrik (30,42%), PBB-P2 (29,58%), serta PBJT atas Makanan dan/atau Minuman (23,49%).

Adapun jika dilihat dari efeknya terhadap agregat pertumbuhan (andil), PKB dan Opsen PKB merupakan pajak dengan andil pertumbuhan terbesar (18,27%). Andil tertinggi berikutnya yaitu PBB-P2, BPHTB, dan PBJT atas Tenaga Listrik, masing-masing sebesar 3,23%, 2,85%, dan 1,73%. Di sisi lain, jenis pajak yang memberikan andil negatif terbesar adalah Pajak Rokok sebesar -4,43% dan PBBKB sebesar -2,63%. Meskipun kedua jenis pajak tersebut mengalami efek kontraksi yang cukup besar, pertumbuhan positif dari sebelas jenis pajak daerah lainnya dapat mengompensasi kontraksi tersebut, sehingga penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada bulan April tumbuh positif.

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Pajak Daerah April 2026



Sumber: SIKD, data per 22 Juni 2026

REVENUE DETAIL



Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Hingga April 2026 (c to c)

dalam Triliun Rupiah

Jenis Pajak ¹⁾	2025	2026	Growth (%)	Andil Pertumbuhan (%)
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	0.77	0.93	20.37% ▲	0.20% ▲
PKB dan Opsen PKB	17.38	20.46	17.71% ▲	3.89% ▲
Pajak Air Tanah	0.34	0.40	17.58% ▲	0.08% ▲
PBB-P2	5.80	6.64	14.38% ▲	1.05% ▲
PBJT Makanan dan/atau Minuman	5.82	6.47	11.27% ▲	0.83% ▲
Pajak Alat Berat	0.03	0.03	10.44% ▲	0.00% ▲
PBJT Jasa Parkir	0.29	0.31	8.56% ▲	0.03% ▲
PBJT Tenaga Listrik	6.50	6.94	6.75% ▲	0.55% ▲
MBLB dan Opsen MBLB	0.73	0.76	4.80% ▲	0.04% ▲
BPHTB	6.80	7.09	4.23% ▲	0.36% ▲
Pajak Reklame	0.89	0.91	2.14% ▲	0.02% ▲
PBJT Jasa Perhotelan	3.33	3.38	1.55% ▲	0.07% ▲
BBNKB dan Opsen BBNKB	9.74	9.49	-2.62% ▼	-0.32% ▼
Pajak Air Permukaan	0.42	0.41	-3.39% ▼	-0.02% ▼
PBBKB	11.92	11.41	-4.29% ▼	-0.65% ▼
Pajak Rokok	8.37	5.83	-30.38% ▼	-3.21% ▼
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	-31.84% ▼	0.00% ▼

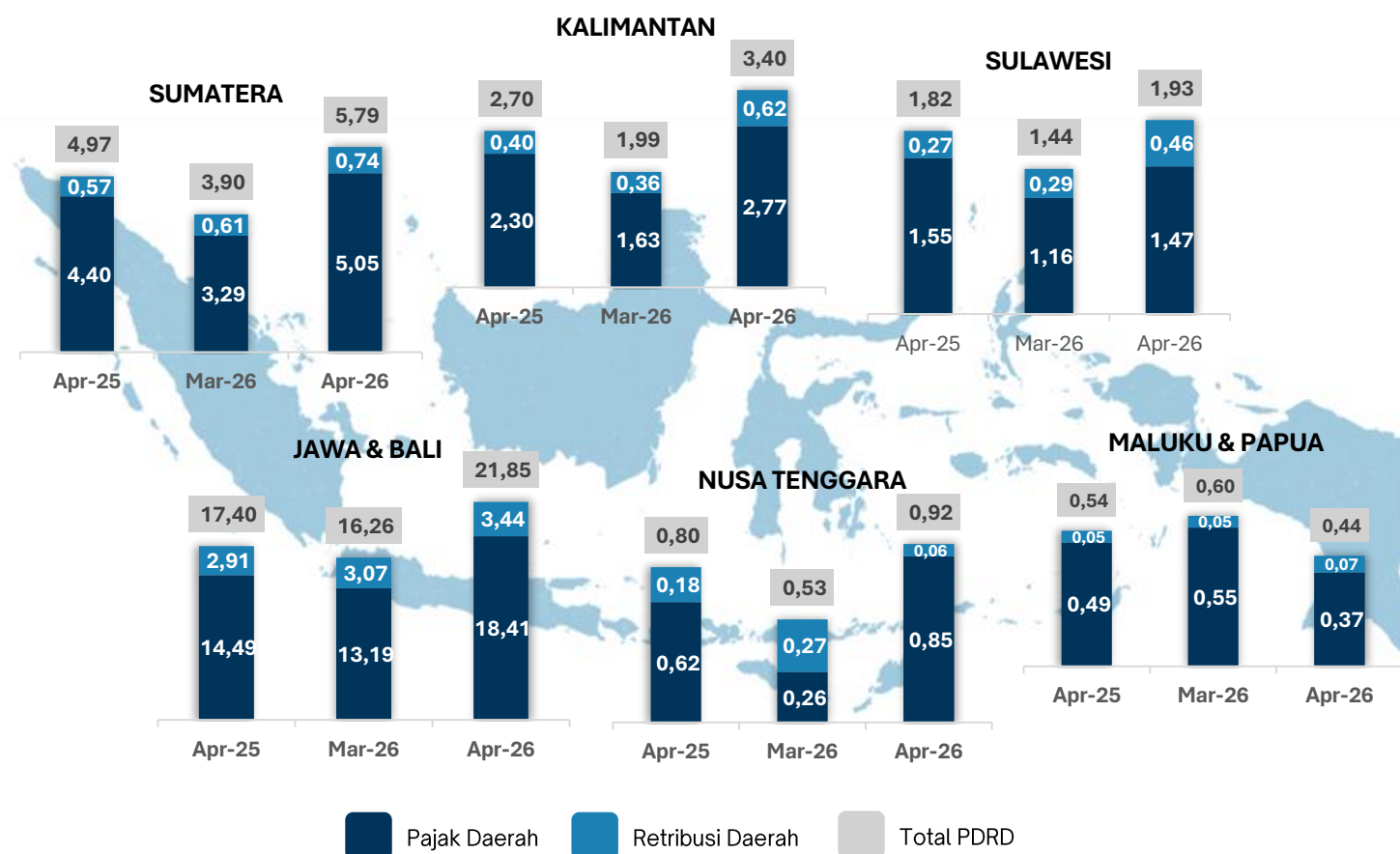
Sumber: SIKD, data per 22 Juni 2026

Secara kumulatif hingga April 2026, terdapat dua belas jenis pajak daerah yang mencatatkan kinerja positif, sedangkan lima jenis pajak daerah lainnya mengalami kontraksi. Keseluruhan jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tumbuh positif sepanjang periode Januari hingga April 2026. PKB dan Opsen PKB memberikan andil pertumbuhan terbesar, selanjutnya adalah PBB-P2 dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Ketiganya memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah pada periode ini. Di sisi lain, dari kelompok pajak yang mengalami kontraksi, Pajak Rokok memiliki andil paling besar. Penurunan ini mengikuti dinamika penerimaan cukai hasil tembakau. Kendati terdapat tekanan kontraksi dari beberapa jenis pajak, pertumbuhan positif dari dua belas jenis pajak daerah lainnya berhasil menjaga agregat pajak daerah tetap tumbuh positif secara kumulatif hingga April 2026.

¹⁾ PBJT: Pajak Barang Jasa Tertentu, PBB P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, MBLB: Mineral Bukan Logam dan Batuan, PKB: Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PAB: Pajak Alat Berat



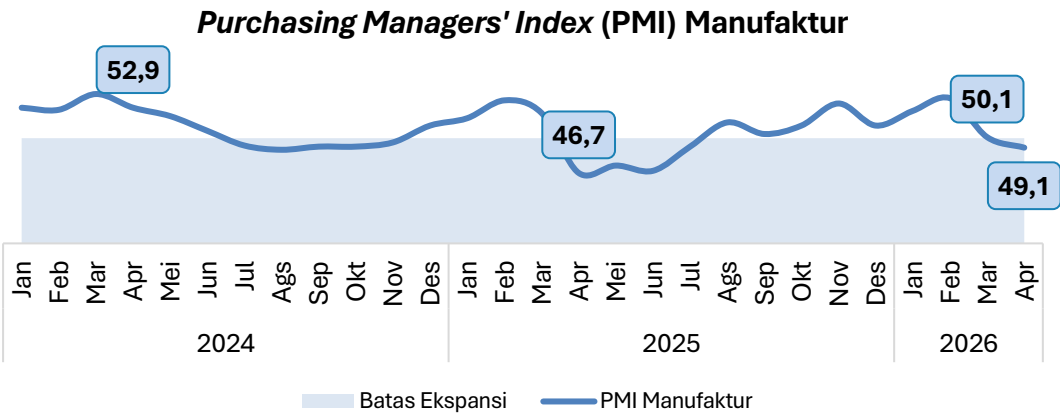
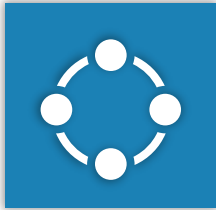
Realisasi PDRD April Secara Spasial (yoy dan *mtm*)



Sumber: SIKD, data per 22 Juni 2026

Secara spasial, seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan positif penerimaan PDRD pada bulan April 2026, baik secara yoy maupun *mtm*, kecuali wilayah Maluku dan Papua yang berkontraksi akibat penurunan penerimaan pajak daerah. Secara yoy, wilayah Kalimantan mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 25,96%, didorong oleh pertumbuhan baik pada pajak daerah maupun retribusi daerah. Sementara itu, secara *mtm*, wilayah Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan tertinggi (73,29%), dipicu oleh akselerasi pajak daerah. Sebaliknya, pertumbuhan di wilayah Sulawesi dipicu oleh pertumbuhan retribusi daerah yang mampu mengompensasi kontraksi pada penerimaan pajak daerahnya.

RELATED INDICATORS



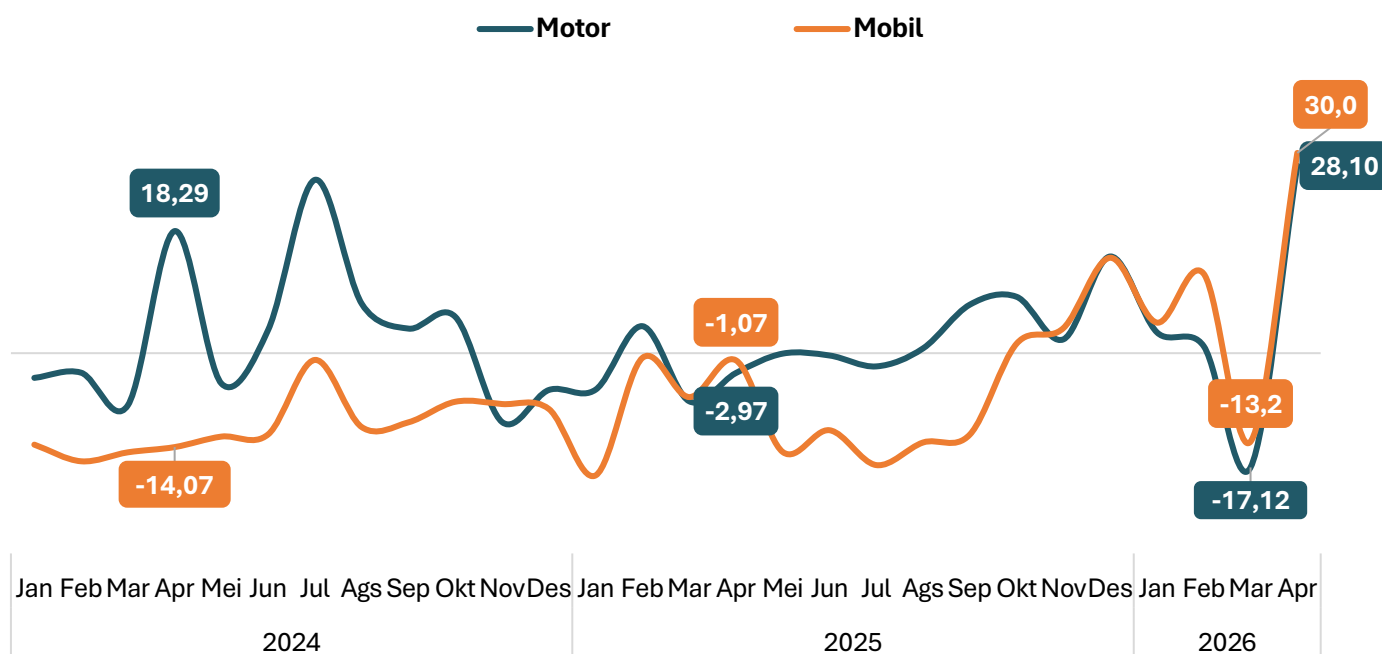
Kinerja manufaktur pada bulan April 2026 berada dalam fase kontraksi dengan indeks sebesar 49,1. Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja tersebut masih jauh lebih tinggi. Rasionalisasi atas kenaikan harga bahan baku serta gangguan pasokan secara global ditengarai menjadi pelemahan manufaktur Indonesia. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan basis pajak daerah, pelemahan PMI Manufaktur dapat mereduksi permintaan atas barang atau jasa yang menjadi basis pemungutan pajak daerah.

Sementara itu, dari sisi konsumsi, terjadi pelemahan daya beli masyarakat pada periode April 2026. Hal ini diindikasikan dari *Retail Sales Index* bulan April yang berkontraksi 3,7% yoy dan menurun 11,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Normalisasi atas konsumsi pasca hari besar keagamaan tentunya berpengaruh pada pelemahan konsumsi masyarakat. Tercatat, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kontraksi antara lain: Makanan, Minuman dan Tembakau; Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Peralatan Informasi dan Komunikasi; Barang lainnya; serta Barang Sandang.





Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor (% yoy)



Sumber: Gaikindo dan AISI

Sektor otomotif kembali menunjukkan kinerja positif pada periode April ini setelah bulan sebelumnya berkontraksi secara yoy. Penjualan kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua sama-sama mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada bulan April ini, penjualan kendaraan roda empat mencapai 75.736 unit atau meningkat 30% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan kendaraan roda dua pada April ini melonjak 28,1% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama atau mencapai 520.972 unit. Kinerja positif pada bulan ini turut mendorong penjualan kumulatif kendaraan bermotor hingga April yang tumbuh secara yoy masing-masing 6,9% dan 2,16% untuk kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua. Dengan demikian, unit kendaraan bermotor yang terjual untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat hingga April 2026 masing-masing sebanyak 2.135.063 unit dan 287.579 unit.

VEHICLES TAX COMPLIANCE



Kepatuhan Pembayaran Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Unit Kendaraan)

Kategori	s.d. April 2025	s.d. April 2026	Growth
Lunas	17.525.017	16.870.434	-3,74%
Kendaraan Dengan Tunggakan	1.720.006	1.150.200	-33,13%
Kendaraan Tahun berjalan	13.785.561	13.423.666	-2,63%
Kendaraan Baru	2.019.450	2.296.568	13,72%
Belum Lunas	18.631.971	19.735.728	5,92%
Kendaraan Aktif	36.156.988	36.606.162	1,24%
Tingkat Kepatuhan	48,47%	46,09%	-2,38%

Sumber: Jasa Raharja

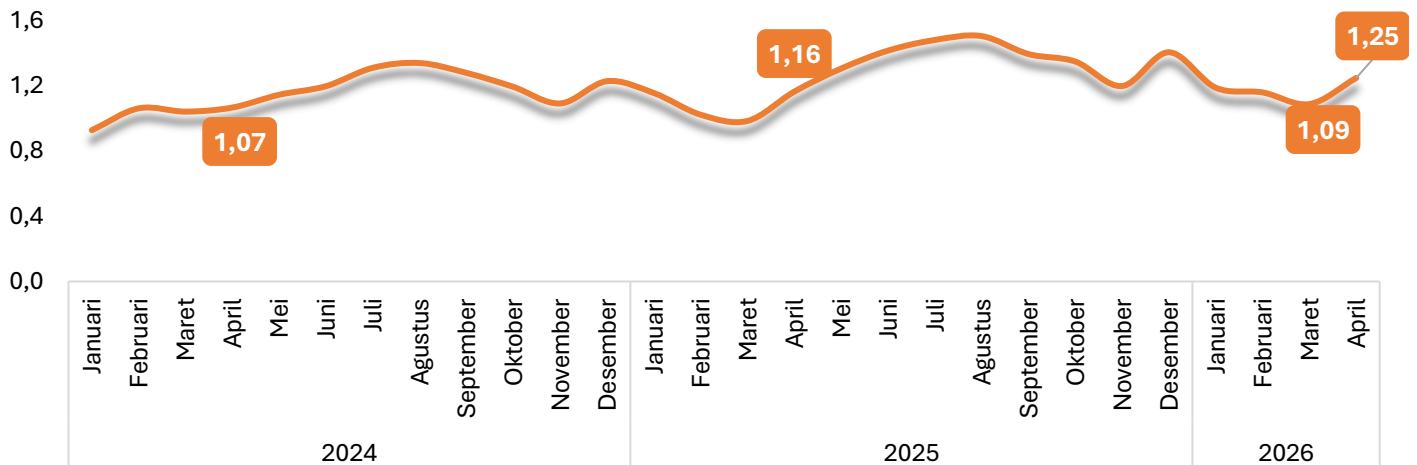
Kinerja kepatuhan pembayaran PKB hingga April terpantau masih menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendaraan bermotor yang sebelumnya memiliki tunggakan dan melakukan pelunasan jumlahnya semakin menurun signifikan. Artinya kendaraan-kendaraan yang sebelumnya masuk sebagai kategori kepatuhan nonsukarela (*involuntary compliance*) bergeser ke dalam kategori *non-compliance*. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang sebelumnya melakukan pembayaran tepat waktu (*voluntary compliance*) mengalami penurunan pada periode hingga April 2026 ini. Menariknya dengan kepatuhan yang menurun namun justru penerimaan PKB hingga April 2026 tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adanya kebijakan insentif pada tahun lalu berupa pembebasan tunggakan pokok PKB di beberapa wilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya penerimaan PKB tidak disertai dengan kenaikan tingkat kepatuhan. Insentif pembebasan tunggakan pokok pajak mendorong kendaraan-kendaraan yang menunggak untuk mendaftarkan kembali kendaraan bermotornya dan hanya membayar PKB tahun berjalan saja. Sementara itu, yang berlaku tahun ini, kendaraan yang menunggak tetap harus membayar PKB pada tahun berjalan dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

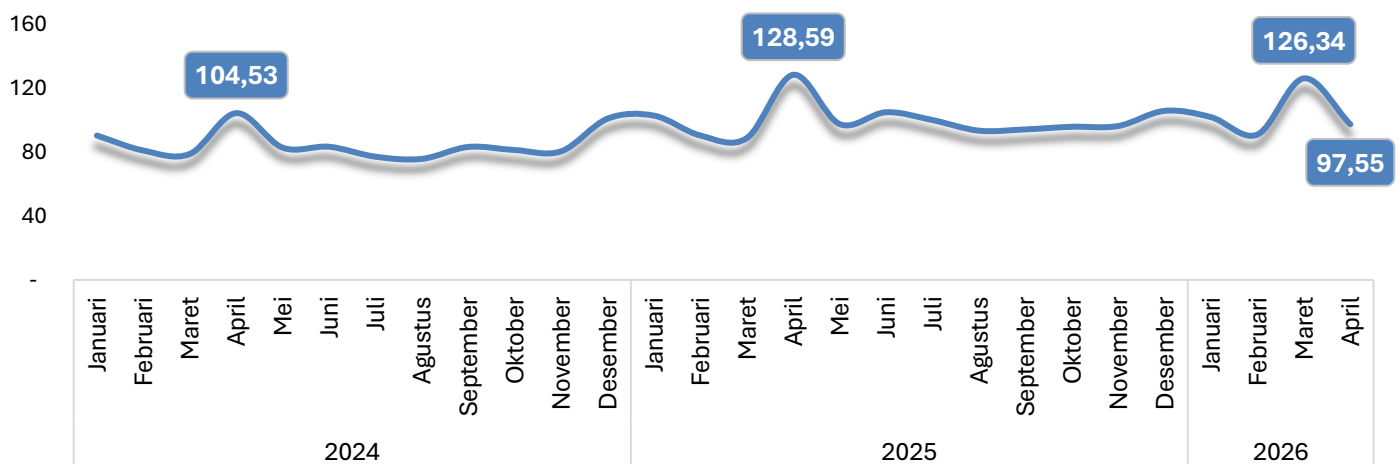
TOURISM & HOSPITALITY TREND



Kunjungan Wisatawan Mancanegara
(Juta Kunjungan)



Kunjungan Wisatawan Nusantara
(Juta Kunjungan)



Sumber: BPS

Sementara itu, pada sektor pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan pada bulan April hanya terjadi pada wisatawan mancanegara sedangkan perjalanan wisatawan nusantara menurun secara yoy. Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 ini mencapai 1,25 juta orang, meningkat 7,22% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan tumbuh 8,2% mtm. Sementara itu, pasca libur panjang lebaran terjadi normalisasi perjalanan wisata domestik, jumlah kunjungannya turun 24,14% yoy dan 22,79% mtm.



Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)

Klasifikasi Hotel	Apr-25	Mar-26	Apr-26
Bintang 1	33,56	31,62	33,95
Bintang 2	45,01	33,27	45,85
Bintang 3	46,55	41,74	47,61
Bintang 4	48,54	44,65	51,29
Bintang 5	50,11	44,84	52,79
TPK Bintang	46,98	42,78	48,83
TPK Nonbintang dan Akomodasi Lainnya	25,75	23,47	24,96
TPK (Total)	36,75	33,28	37,96

Sumber: BPS

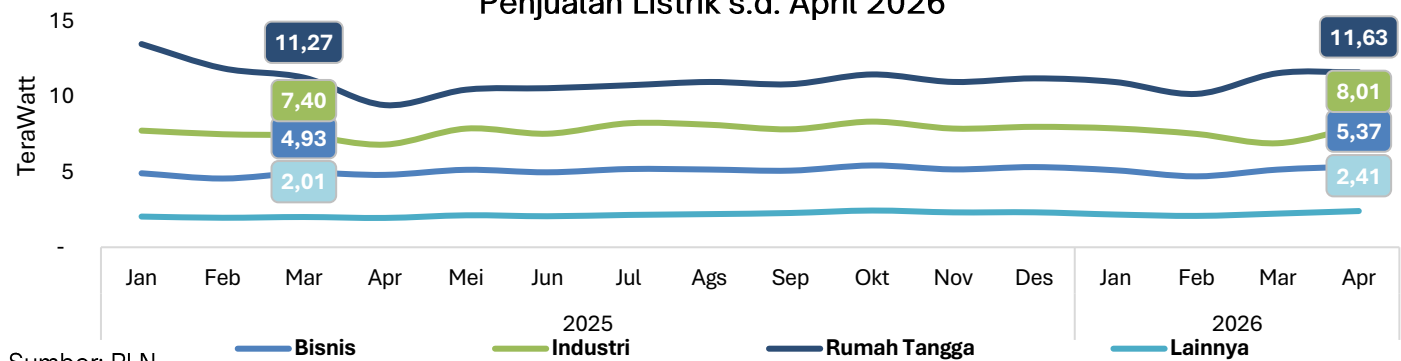
Dinamika yang terjadi pada kunjungan wisatawan ternyata tetap dapat mendorong pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun bulan sebelumnya, TPK pada April ini secara keseluruhan tumbuh positif dan hampir dialami oleh seluruh kategori akomodasi. Tercatat, hanya TPK hotel Nonbintang yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun tetap tumbuh jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Pertumbuhan positif TPK turut memperkuat basis pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan. Peningkatan TPK mencerminkan bertambahnya aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi, dimana nilai transaksi atas penghunian kamar hotel menjadi objek pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan. Kenaikan TPK pada bulan April ini juga selaras dengan peningkatan pada penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan.

ENERGY CONSUMPTION

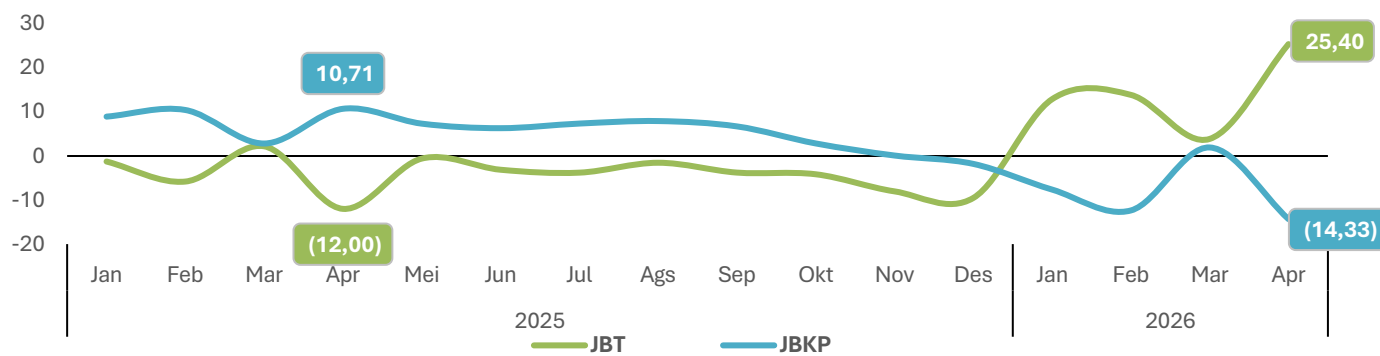


Penjualan Listrik s.d. April 2026



Sumber: PLN

Pertumbuhan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor s.d. April 2026 (%)



Sumber: BPH Migas

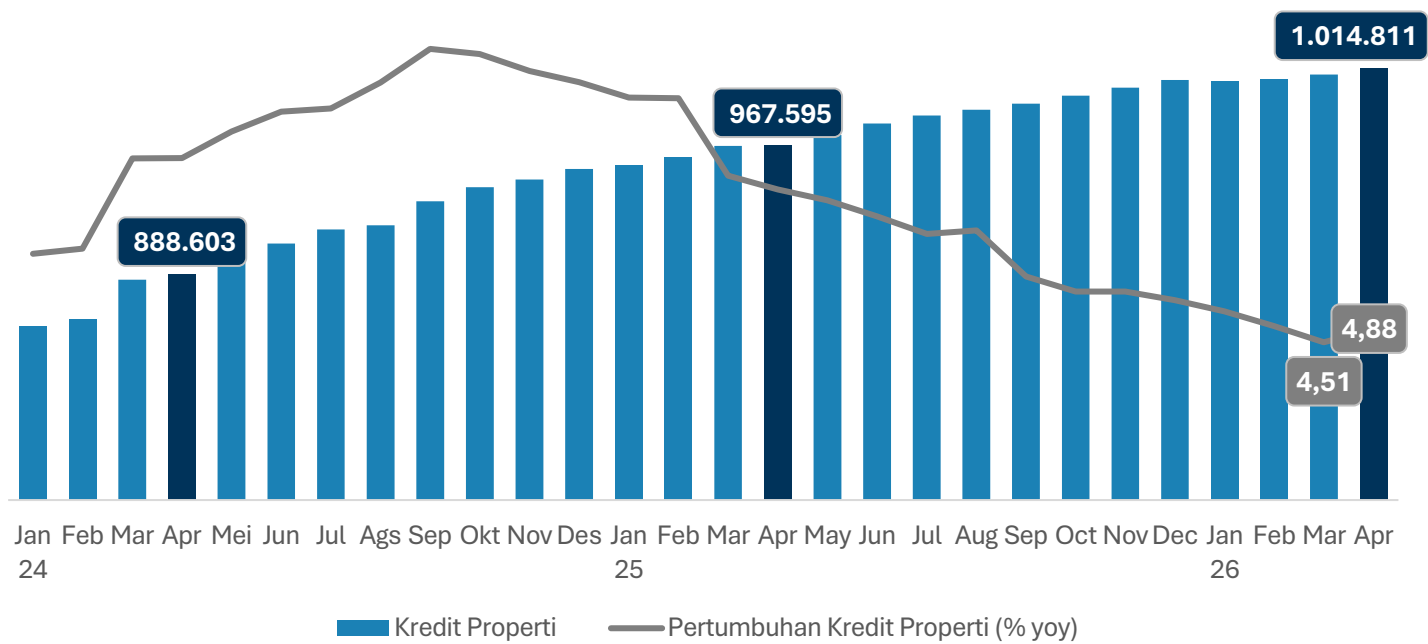
Konsumsi energi yang menjadi salah satu representasi basis pajak PDRD mengalami capaian positif pada bulan April ini, terutama penjualan listrik. Setelah mengalami penurunan penjualan hingga Triwulan I 2026, pada April ini penjualan listrik kembali meningkat 19,08% yoy dan terjadi pada semua kategori pelanggan. Sektor lainnya yang merupakan gabungan dari sektor pemerintahan, sosial, layanan khusus dan lainnya mengalami kenaikan penjualan tertinggi. Secara yoy, pertumbuhannya mencapai 23,49%, sedangkan jika dibandingkan bulan sebelumnya meningkat sebesar 7,58%. Sementara itu, pada kategori rumah tangga, industri, dan bisnis, berturut-turut kenaikannya secara yoy adalah sebesar 23,13%, 17,46%, dan 11,66%. Kenaikan penjualan listrik khususnya pada ketiga kategori tersebut selaras dengan kenaikan penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Sementara itu, penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) untuk JBT dan JBKP pada bulan April menunjukkan kinerja yang berlawanan. Penjualan JBT pada April 2026 mencapai 1,56 juta kilo liter, tumbuh 25,4% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, penjualan JBKP justru mengalami tekanan kontraksi hingga 14,33% yaitu sebesar 2,27 juta kilo liter. Tampaknya, jika dilihat dari penerimaan PBBKB yang juga menurun, efek kontraksi pada JBKP tidak mampu teredam oleh kenaikan JBT, mengingat JBKP memiliki share penjualan yang lebih tinggi dan juga harga dasar yang lebih tinggi.

¹ Kebijakan jenis-jenis BBM meliputi Jenis BBM Tertentu (JBT) terdiri dari minyak tanah dan solar yang diberikan subsidi dan kompensasi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni bensin RON 90 Pertalite yang diberikan kompensasi, dan Jenis BBM Umum (JBU) untuk semua jenis BBM yang tidak diberikan subsidi dan kompensasi (harga *business to business*).



Realisasi dan Pertumbuhan Kredit Properti
(miliar rupiah)



Sumber: SKKI, Bank Indonesia

Sektor properti menunjukkan sinyal positif pada April 2026, dengan terakselerasinya pertumbuhan kredit properti sebesar 4,88% yoy setelah dalam beberapa bulan terakhir mengalami perlambatan. Kenaikan ini didorong oleh kredit kepemilikan rumah tapak terutama untuk tipe 22 m2 hingga 70 m2 yang tumbuh sebesar 6,06% yoy dan rumah tapak tipe diatas 70 m2 yang tumbuh sebesar 4,45%. Kenaikan tersebut sekaligus meredam kontraksi kredit properti yang terjadi pada hunian rumah tapak tipe s.d. 21 m2 dan kepemilikan rumah susun 70 m2 ke bawah. Mengingat saat ini sebesar 69,86% kepemilikan rumah diperoleh melalui kredit perbankan, tumbuhnya kredit ini menjadi sinyal meningkatnya basis penerimaan BPHTB. Adapun, respon peningkatan penerimaan BPHTB sejalan dengan peningkatan basis pajak ini.

PENANGGUNG JAWAB

Lydia Kurniawati Christyana

TIM PENULIS

1. Guruh Panca Nugraha
2. Catur Panggih Pamungkas
3. Ummi Zulianti
4. Satriyo Ari Raharjo
5. Puput Nurhayati
6. Trianto Budi Utama
7. Muhammad Fawwaz Ananda



PDRD

LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



Diterbitkan Tahun 2026
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>